

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR : 23 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 18 NOPEMBER 2010

**RINCIAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL,  
 BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
 TAHUN ANGGARAN 2010**

NO.	URAIAN		VERIFIKATOR ADMINISTRATIF / KOORDINATOR	VERIFIKATOR TEKNIS / SKPD TERKAIT	RENCANA BELANJA (Rp)
<b>A.</b>	<b>Belanja Hibah</b>				<b>128.085.835.000</b>
	<b>A.1</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta</b>			<b>17.525.000.000</b>
	A.1.1	Belanja Hibah kepada Bidang Keagamaan			525.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	125.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	100.000.000
	3	Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat (BAZ)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	100.000.000
	4	Belanja Hibah kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial, Kantor Kementrian Agama Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000
	5	Belanja Hibah Sertifikasi Tanah Wakaf	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	100.000.000

	A.1.2	Belanja Hibah kepada Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			9.950.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dan Cabang Olah Raga	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.800.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	150.000.000
	A.1.3	Belanja Hibah kepada Bidang Keprofesian			500.000.000
	1	Belanja Hibah kepada KORPRI	Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	500.000.000
	A.1.4	Belanja Hibah kepada Bidang Kesehatan			2.500.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	1.000.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	500.000.000
	3	Belanja Hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	1.000.000.000
	A.1.5	Belanja Hibah kepada Bidang Peranan Wanita			1.250.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Organisasi Wanita	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pemberdayaan Masyarakat	500.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat	750.000.000

A.1.6	Belanja Hibah Bidang Sarana Prasarana			2.800.000.000
1	Belanja Hibah Biaya Nilai Tegakan kepada Perum Perhutani	Bagian Pertanahan	Dinas Kehutanan	2.800.000.000
<b>A.2</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan</b>			<b>18.597.400.000</b>
A.2.1	Belanja Hibah Pendampingan Program kepada Kelompok Masyarakat			18.597.400.000
1	Belanja Hibah PNPM Mandiri Perdesaan	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	9.500.000.000
2	Belanja Hibah PNPM Mandiri Perkotaan	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	590.000.000
3	Belanja Hibah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat	606.000.000
4	Belanja Hibah Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat	150.000.000
5	Belanja Hibah Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK)	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	135.000.000
6	Belanja Hibah Program TMMD Imbangan	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan	125.000.000
7	Belanja Hibah Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Bagian Perekonomian	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	41.400.000
8	Belanja Hibah Kelompok Perempuan/Koperasi Wanita (195 + 23 Kelompok)	Bagian Perekonomian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.450.000.000
9	Belanja Hibah Permodalan Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan (80 Kelompok Wanita)	Bagian Perekonomian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.000.000.000

<b>A.3</b>	<b>Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			<b>27.959.585.000</b>
A.3.1	Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten	Bagian Tata Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.130.000.000
A.3.2	Belanja Hibah kepada Panwaslu Kabupaten	Bagian Tata Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.640.235.000
A.3.3	Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal			2.189.350.000
1	Belanja Hibah kepada Kepolisian Resor Malang	Bagian Tata Pemerintahan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	1.889.350.000
2	Belanja Hibah kepada Komando Distrik Militer 0818	Bagian Tata Pemerintahan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	300.000.000
<b>A.4</b>	<b>Belanja Hibah Bidang Pendidikan</b>			<b>64.003.850.000</b>
A.4.1	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan			64.003.850.000
1	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan (DAK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	51.835.900.000
2	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan (Pendamping DAK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	5.183.590.000
3	Belanja Hibah Pendampingan Program Rintisan Wajar Dikmen 12 Tahun	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	4.104.360.000
4	Belanja Hibah Rehab Gedung TK / BA	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	50.000.000

	5	Belanja Hibah Rehab Gedung SMP	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	300.000.000
	6	Belanja Hibah Rehab Gedung SMA	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	200.000.000
	7	Belanja Hibah Rehab Gedung SMK	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	150.000.000
	8	Belanja Hibah Perluasan Peningkatan Mutu PLB	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	130.000.000
	9	Belanja Hibah Sarana Penunjang Sekolah SMK	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	1.050.000.000
	10	Belanja Pembangunan RKB SMK Swasta	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	1.000.000.000
<b>B.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>				<b>65.345.674.000</b>
	<b>B.1</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>			<b>65.345.674.000</b>
	B.1.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			<b>65.345.674.000</b>
	1	Bantuan menunjang kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Tata Pemerintahan Umum	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	1.500.000.000
	2	Bantuan kepada Perguruan Tinggi	Bagian Kerjasama	Badan Perencanaan Pembangunan	300.000.000

3	Bantuan untuk Keagamaan	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	525.000.000
4	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Swasta	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kantor Kementrian Agama	500.000.000
5	Bantuan untuk menunjang kemitraan Pemerintah Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	30.000.000.000
6	Bantuan untuk insentif Posyandu	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	800.000.000
7	Bantuan Tambahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial	3.976.334.000
8	Bantuan pada tempat ibadah dan pondok pesantren	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000.000
9	Bantuan untuk kesejahteraan sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	1.000.000.000
10	Bantuan untuk pembinaan kesenian budaya	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500.000.000
11	Bantuan untuk Guru Tidak Tetap (insentif) @ Rp.500.000,- x 1.508 orang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	754.000.000
12	Bantuan untuk penyandang Masalah Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	500.000.000
13	Bantuan untuk Organisasi Sosial dan Pemuda	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga	708.600.000
14	Bantuan untuk Olah Raga Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	250.000.000

	15	Bantuan untuk Guru terpencil @ Rp.250.000,- x 162 orang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	40.500.000
	16	Bantuan Buta Huruf	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	2.575.000.000
	17	Bantuan / Bosda Madin	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten	19.416.240.000
<b>C.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>				<b>13.347.699.000</b>
	<b>C.1</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa</b>			<b>13.347.699.000</b>
	C.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa			12.224.828.500
	1	Belanja Bagi Hasil atas perhitungan Pajak Penerangan Jalan Desa/Kelurahan	Bagian Perekonomian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	12.224.828.500
	C.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa			1.122.870.000
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada Koperasi dan Provinsi Jatim Tahun 2010	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan	990.000.000
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Terminal Landungsari dengan Desa Tahun 2010	Bagian Pemerintahan Desa	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	60.000.000
	3	Kekurangan Belanja Bagi Hasil TPI ke Koperasi dan Provinsi Jatim Tahun 2009	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.600.000

	4	Belanja Bagi Hasil Pengelolaan STA Mantung dengan Desa	Bagian Perekonomian	Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.000.000
	5	Belanja Bagi Hasil TPI ke KUD Mina Jaya (Kekurangan Tahun 2008)	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.270.500
	6	Belanja Bagi Hasil Kerjasama Pasar Bakroto Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading	Bagian Perekonomian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9.000.000
<b>D.</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>				<b>96.256.992.000</b>
	<b>D.1</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</b>			<b>95.531.992.000</b>
	D.1.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa			95.531.992.000
	1	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat	55.000.000.000
	2	Bantuan Tunjangan Tetap Perangkat Desa:			
	-	Kepala Desa : 1 org x 378 Desa x 12 Bln x Rp. 1.203.000,-	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	5.456.808.000
	-	Sekdes : 1 Org x 45 Desa x 3 Bln x Rp. 962.400,-	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	129.924.000
	-	Perangkat Desa : 3.615 Org x 12 Bln x Rp. 802.000,-	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	34.790.760.000
	-	Pemberian Tali Asih Purna Tugas dan Uang Duka Kepala Desa / Perangkat Desa	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Kepegawaian Daerah	112.500.000
	3	Bantuan Penyelenggaraan Pilkades untuk 7 Desa @ Rp.6.000.000,-	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	42.000.000



	<b>D.2</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>			<b>725.000.000</b>
	D.2.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			725.000.000
	1	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Bagian Tata Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	725.000.000
<b>E.</b>		<b>Belanja Tidak Terduga</b>			<b>2.500.000.000</b>
	<b>E.1</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>			<b>2.500.000.000</b>
	E.1.1	Belanja Tidak Terduga			2.500.000.000
	1	Belanja Tidak Terduga	Bagian Administrasi Pembangunan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	2.500.000.000

Diundang di Malang  
Pada tanggal 19 Nopember 2010  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK  
NIP. 19570830 198209 1 001  
Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2010 Nomor 13/A

**BUPATI MALANG,**

Ttd.

**H. RENDRA KRESNA**

